

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024**

Oleh :

BUNGA NATASYA

2110111002

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM TATA NEGARA (PK V)



Pembimbing :

**Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H, S.H., M.H
Beni Kharisma Arrasuli, S.H., M.H**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

No.Reg : 17/PK-V/II/2025

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024**

ABSTRAK

Salah satu permasalahan yang terjadi sepanjang pemilihan umum tahun 2024 ialah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang terjadi pada dapil Sumatera Barat. Permasalahan ini kemudian dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi dan ditindaklanjuti dengan perkara nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 dengan putusan bahwa Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang. Namun dalam implementasi putusan tersebut masih saja ditemukan permasalahan. Rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah *pertama*, Bagaimana pelaksanaan pemungutan suara ulang anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024? *Kedua*, Bagaimana permasalahan hukum yang timbul dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2024? Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris, dengan memakai teknik wawancara, koesioner, studi dokumen dan riset digital. Hasil dari penelitian ini adalah *pertama*, pelaksanaan pemungutan suara ulang anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat berjalan dengan lancar, namun dalam pelaksanaannya terjadi hambatan yaitu faktor cuaca dan penurunan partisipasi pemilih yang sangat signifikan yakni 40,71% jika dibandingkan dengan hasil pemilu sebelumnya. Terhadap hasil dari pemungutan suara ulang yang telah dilakukan juga menghasilkan dampak yakni perubahan formasi pemenang. *Kedua*, permasalahan yang timbul dalam pemungutan suara ulang anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat ialah terjadinya perubahan nomor urut peserta dalam pemungutan suara ulang, sosialisasi yang dilakukan KPU tidak merata, dan munculnya temuan pelanggaran oleh Bawaslu. Permasalahan tersebut muncul sebagai akibat dari lemahnya regulasi yang tersedia, yang mana belum mengatur secara lengkap dan rinci mengenai prosedur pemungutan suara ulang anggota Dewan Perwakilan Daerah. Adapun saran yang dapat diberikan dari penelitian ini ialah agar dilakukannya upaya perbaikan terhadap aturan pemungutan suara ulang agar memuat prosedur pemungutan suara ulang anggota Dewan Perwakilan Daerah secara rinci dan lengkap sehingga permasalahan tersebut tidak terulang kembali.